

**STUDI KOMPARASI PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN
PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR DI PT. ADIRA FINANCE
(SECARA KONVENSI) DENGAN PERJANJIAN
PEMBIAYAAN DI BMT SURYA UMMAT KLATEN
(SECARA SYARIAH)**



NASKAH PUBLIKASI

Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh

DWI SUSANTI

C.100.090.002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

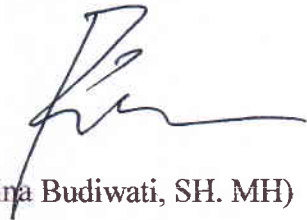
2013

HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah Publikasi ini telah disetujui oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Septarina Budiwati, SH. MH)

Pembimbing II



(Mutimatum N'ami, SH. MH)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Muchamad Iksan, S.H.,M.H)

ABSTRAK

DWI SUSANTI, NIM, C100090002, Studi Komparasi Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor di PT. Adira Finance (Secara Konvensional) dengan Perjanjian Pembiayaan di BMT Surya Ummat Klaten (Secara Syariah).

Melihat berbagai kelemahan yang terdapat pada lembaga keuangan bank dalam menyalurkan kebutuhan dana, maka muncul lembaga keuangan bukan bank, lembaga ini dikenal sebagai “lembaga pembiayaan” yang menawarkan jenis-jenis pembiayaan dan penyaluran dana bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Salah satu lembaga pembiayaan bukan bank tersebut adalah lembaga pembiayaan dengan prinsip konvensional yaitu PT. Adira Finance. PT. Adira Finance dimana mereka menyediakan produk inovatif dan kreatif yang secara langsung memudahkan konsumen dalam pembiayaan seperti pembiayaan kredit sepeda bermotor.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan menggunakan sistem konvensional di PT. Adira Finance dan dengan sistem syariah di BMT Surya Ummat Klaten, apakah perbedaan dan persamaannya serta permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan tersebut. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dalam pembiayaan kedua lembaga tersebut, mengetahui bagaimana pelaksanaannya serta permasalahan apa yang muncul dalam pembiayaan ini.

Alat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian antar kedua lembaga tersebut adalah apabila BPKB kendaraan motor tersebut sebagai barang jaminan hingga debitur melunasi seluruh kewajibannya terhadap kedua lembaga pembiayaan ini. Dari segi persamaan bahwa kedua lembaga tersebut dalam permohonan pembiayaan melalui tahapan permohonan, pengumpulan data, analisa pembiayaan, serta persetujuan pembiayaan sedangkan perbedaannya adalah pada sumber hukum yang mengatur pembiayaan, yaitu pada pembiayaan secara konvensional bersumber pada hukum positif sedangkan secara syariah bersumber baik pada hukum positif dan hukum Islam. Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian adalah debitur lalai atau tidak membayar angsuran yang telah diperjanjikan padahal telah melewati jatuh tempo, obyek perjanjian telah berpindah tangan pada orang lain tanpa sepengetahuan pihak perusahaan pembiayaan dan obyek perjanjian telah hilang atau musnah.

Kata kunci:

ABSTRACT

DWI SUSANTI, NIM. C100090002, Comparison Implementation Study for Motorcycle Purchase Financing Agreement in PT. Adira Finance (Conventional) with Financing Agreement BMT Surya Ummat in Klaten (Syariah).

View other shortcomings in bank financial institution in providing necessary funds, emerging non-bank financial institutions, the board is known as a "financing institution" that offers the type of financing and channeling funds on behalf of those in need. One of the non-bank financing institutions are the conventional principles of finance that is PT. Adira Finance. Finance PT. Adira where they provide innovative and creative products that directly facilitate the financing of consumer credit financing as motorcycle.

Tree problem in this study, is how the implementation of the motorcycle purchase financing agreement with the conventional system in PT. Adira finance and the system Islamic in BMT Surya Ummat Klaten, what's the difference and the nearest equivalent and any problems that arise in the implementation of the financing agreement. While the purpose of this is to determine the differences and similarities in the funding of those organizations, knowing how implementation and any problems that arise in this financing.

Analysis tools used in this research is the field study or library studies are essentially level data analyzed using descriptive qualitative.

From the result of the research note that the implementation of the agreement between both boards is when BPKB motor vehicle as collateral to the debtor to pay off items throughout the obligations of both these funding agencies. In terms of the similarities that the two institutions in, funding applications through the application stage, data collection, analysis financing, as well as financing agreement while the difference will be the source of law regulating the financing, conventional financing that is sourced on the Positive while syariah hokum good hokum sourced positive Muslim and hokum. Problems that arise in the implementation of the agreement is a debtor default or non-payment of installments that have been entered into but has passed due, the object of the agreement was passed on to others without the knowledge of the enterprise agreement the financing and the object is lost or destroyed.

Keywords:

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan perlu mendapatkan perhatian dan dukungan yang serius dari pemerintah yang berkewajiban mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suatu keadaan yang menunjang kehidupannya. Pembangunan Indonesia dalam bidang industri mengakibatkan meningkatnya hasil industri, salah satunya adalah kendaraan bermotor. Maka hasil industri tersebut haruslah terjual agar pabrik yang memproduksi dapat tetap berproduksi. Pada dasarnya kebutuhan manusia semakin bertambah seiring dengan perkembangan taraf hidupnya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya manusia menempuh berbagai cara untuk memenuhinya seperti melakukan jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut sangat dibutuhkan sejumlah dana untuk dijadikan sebagai modal.

Ditinjau berdasarkan taraf hidup dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka dapat ditemui adanya dua sisi yang berbeda, disatu sisi ada sekumpulan orang atau badan hukum yang memiliki kelebihan dana dan disisi lain begitu banyaknya masyarakat baik perorangan maupun lembaga atau badan usaha yang membutuhkan dana. Kondisi yang demikian ini melahirkan hubungan timbal balik diantara mereka. Dengan adanya kelebihan dana tersebut maka timbul suatu pemikiran untuk menginvestasikan dana tersebut pada suatu usaha yang menguntungkan. Dari sinilah kemudian muncul lembaga-lembaga keuangan sebagai perantara yang menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan merupakan perantara keuangan masyarakat.

Lembaga keuangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, pinjaman, dan jasa keuangan lainnya, jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi bank adalah melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan sistem pembayaran bagi banyak sektor ekonomi.

Pengertian lembaga keuangan bukan bank dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.¹

Lembaga keuangan bukan bank dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bukan bank yang beroperasi menggunakan sistem konvensional dan lembaga keuangan bukan bank yang beroperasi menggunakan sistem syariah. Lembaga keuangan bukan bank memiliki banyak jenis, dan salah satunya adalah lembaga pembiayaan.

¹ Munir Fuady, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 200

Dalam hal ini konsumen juga berhak untuk menentukan dalam memilih lembaga pembiayaan yang menggunakan sistem konvensional ataupun lembaga pembiayaan yang menggunakan sistem syariah. Keduanya secara garis besar berperan membantu masyarakat dalam hal pembiayaan, namun keduanya pun juga memiliki perbedaan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan konsumen.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menyusun skripsi dengan judul **“STUDI KOMPARASI PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR DI PT. ADIRA FINANCE (SECARA KONVENSIONAL) DENGAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN DI BMT SURYA UMMAT KLATEN (SECARA SYARIAH)”**.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pelaksanaan perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor menggunakan sistem konvensional di PT. Adira Finance dengan perjanjian pembiayaan menggunakan sistem syariah di BMT Surya Ummat Klaten.
- b. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor menggunakan sistem konvensional di PT. Adira Finance dengan perjanjian pembiayaan menggunakan sistem syariah di BMT Surya Ummat Klaten.
- c. Untuk mengetahui permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor menggunakan sistem konvensional di PT. Adira Finance dengan perjanjian pembiayaan menggunakan sistem syariah di BMT Surya Ummat Klaten.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Menurut R. Setiawan, definisi perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dikatakan kurang lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga mengandung arti yang sangat luas karena dengan dipergunakannya kata perbuatan tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Beliau memberikan definisi sebagai berikut :

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sehingga menurut beliau perumusannya menjadi: Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²

² R. Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Bina Cipta, hal. 49.

2. Unsur- Unsur yang Terdapat di dalam Perjanjian

Perjanjian mengandung beberapa unsur-unsur, sebagai berikut :

- a. Adanya pihak-pihak
- b. Adanya persetujuan para pihak
- c. Adanya tujuan yang akan dicapai
- d. Adanya prestasi yang dilaksanakan
- e. Adanya syarat-syarat tertentu
- f. Adanya bentuk tertentu.³

3. Azas-Azas Perjanjian

a. Azas Kebebasan Berkontrak

Azas kebebasan berkontrak adalah kebebasan untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, kesusilaan. Pasal 1338 ayat 1 KUHPdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal ini menuntut kita untuk dapat membuat perjanjian mengenai hal apapun, diatur secara apa saja, dan perjanjian tersebut akan mengikat sebagaimana hal terikatnya kita pada Undang-Undang.⁴

b. Azas Konsensualisme

Adalah suatu perjanjian cukup dengan adanya kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.⁵

c. Azas Itikad Baik

Itikad baik itu mempunyai dua pengertian, yaitu :

- 1) Itikad baik dalam arti subyektif, yaitu kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Itikad baik dalam arti subyektif ini diatur dalam Pasal 531 Buku II KUHPdata.
- 2) Itikad baik dalam arti obyektif, yaitu pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPdata, dimana hakim diberikan suatu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian agar jangan sampai pelaksanaannya tersebut melanggar norma-norma kepatutan dan keadilan. Kepatutan dimaksudkan agar jangan sampai pemenuhan kepentingan salah satu pihak terdesak, harus adanya keseimbangan, keadilan artinya bahwa kepastian untuk mendapatkan apa yang telah diperjanjikan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku.⁶

³ Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Bamdung, Citra Aditya Bakti, hal. 78

⁴ [Rachdian Yahya](http://www.dheanbj.com/2012/09/asas-asas-hukum-perjanjian.html), *Azas Azas Hukum Perjanjian*, dalam <http://www.dheanbj.com/2012/09/asas-asas-hukum-perjanjian.html>, diunduh Kamis, 14 Februari 2013 pukul 11:06

⁵ A. Qiram Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty, hal. 20

⁶ M Hariyanto, 2009, *Azas Azas Perjanjian*, dalam <http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/asas-asas-perjanjian.html>, diunduh Kamis 14 Februari 2013 pukul 11:45

d. Azas Kekuatan Mengikat

Azas ini juga dikenal dengan *adagium pacta sunt servanda*, yaitu masing-masing pihak yang terkait dalam suatu perjanjian harus menghormati dan melaksanakan apa yang telah mereka perjanjikan dan tidak boleh melakukan perbuatan yang menyimpang atau bertentangan dari perjanjian tersebut.⁷

e. Azas Kepribadian

Ketentuan mengenai hal ini ada pengecualiannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1337 KUHPdata yaitu, dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu. Pasal ini memberi pengertian bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang telah ditentukan. Sedangkan dalam Pasal 1338 KUHPdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.⁸

4. Jenis Perjanjian

Secara garis besar perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

a. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.⁹ Perjanjian timbal balik diatur dalam Pasal 1313 KUHPdata, misalnya perjanjian jual-beli.

b. Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak adalah suatu perjanjian yang hanya memberikan kewajiban kepada satu pihak saja, sedangkan hak diberikan kepada pihak lainnya¹⁰ (Pasal 1313 KUHPdata), misalnya hibah.

c. Perjanjian Cuma-Cuma

Menurut ketentuan Pasal 1314 KUHPdata, suatu persetujuan yang dibuat dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada, pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.¹¹

d. Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe

⁷ Wibowo Tunardy, 2012, *Jurnal Hukum*, dalam <http://www.jurnalhukum.com/asas-asas-perjanjian/>, diunduh Kamis, 14 Februari 2013 pukul 11:31

⁸ M Hariyanto, 2009, *Azas Azas Perjanjian*, dalam <http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/asas-asas-perjanjian.html>, diunduh Kamis 14 Februari 2013 pukul 11:51

⁹ M Hariyanto, 2009, *Jenis-Jenis Perjanjian*, dalam <http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/jenis-jenis-perjanjian.html>, diunduh Kamis 14 Februari 2013 pukul 13:12

¹⁰ R. Subekti, 1963, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa, hal. 45

¹¹ M Hariyanto, 2009, *Jenis-Jenis Perjanjian*, dalam <http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/jenis-jenis-perjanjian.html>, diunduh Kamis 14 Februari 2013 pukul 13:06

yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerdara.¹²

e. Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdara, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak- pihak yang mengadakannya.¹³

f. Perjanjian Konsensual

Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perjanjian. Menurut KUHPerdara perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338).¹⁴

g. Perjanjian Liberatoir (Pasal 1440 dan Pasal 1442 KUHPerdara)

Perjanjian liberatoir adalah perbuatan hukum yang atas dasar sepakat para pihak menghapuskan perikatan yang telah ada. Misalnya, A mengadakan perjanjian jual beli dengan B, kemudian, 2 hari berikutnya dibatalkan atas kesepakatan bersama.¹⁵

5. Syarat Sahnya Perjanjian

Di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur tentang empat syarat yang menentukan sahnya suatu perjanjian, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Dua syarat pertama disebut juga dengan syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif. Dalam hal tidak terpenuhinya unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan) maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak terpenuhinya unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab yang halal) maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum.¹⁶

6. Prestasi dan Wanprestasi

Kata “wanprestasi” berasal dari bahasa Belanda *wandaad* yang berarti prestasi buruk. Menurut R. Subekti, wanprestasi (kealpaan atau kelalaian) seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya

¹² M Hariyanto, 2009, *Jenis-Jenis Perjanjian*, dalam <http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/jenis-jenis-perjanjian.html>, diunduh Kamis 14 Februari 2013 pukul 13:17

¹³ M Hariyanto, 2009, *Jenis-Jenis Perjanjian*, dalam <http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/jenis-jenis-perjanjian.html>, diunduh Kamis 14 Februari 2013 pukul 13:19

¹⁴ M Hariyanto, 2009, *Jenis-Jenis Perjanjian*, dalam <http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/jenis-jenis-perjanjian.html>, diunduh Kamis 14 Februari 2013 pukul 13:22

¹⁵ Retno Prabandari, 2007, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja*, dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29515/3/Chapter%20II.pdf>, diunduh Kamis 14 Februari 2013 pukul 13:38

¹⁶ Aramayudho, 2012, *Hukum Perikatan*, dalam <http://aramayudho.wordpress.com/2012/04/07/hukum-perjanjian/>, diunduh Kamis 14 Februari 2013 pukul 13:44

- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya¹⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembiayaan

1. Pengertian Tentang Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana, baik dalam bentuk uang maupun barang modal. Penyediaan dana ini dilakukan dengan cara menarik secara tidak langsung dana dari masyarakat.

2. Bentuk Hukum Dan Fungsi Lembaga Pembiayaan

Sesuai Pasal 3 Keppres Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, mengenai bentuk hukum badan usaha yang diberi wewenang berusaha di bidang lembaga pembiayaan yang meliputi Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan Pembiayaan, ditentukan bahwa untuk Perusahaan Pembiayaan tersebut berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.

C. Tinjauan Umum tentang Pembiayaan Konsumen

1. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Pada dasarnya pembiayaan konsumen merupakan sejenis kredit konsumsi (*consumer credit*), sehingga dapat dikatakan bahwa pengertian kredit konsumsi sebenarnya secara substantif sama saja dengan pembiayaan konsumen, yaitu kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang, kredit yang demikian itu dapat mengandung resiko yang lebih besar daripada kredit dagang biasa, maka dari itu biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.¹⁸

2. Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen

Dasar hukum dari perjanjian pembiayaan konsumen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Dasar Hukum Substantif
- b. Dasar Hukum Administratif

3. Kedudukan Para Pihak Dalam Transaksi Pembiayaan Konsumen

- a. Hubungan Pihak Kreditur dengan Konsumen
- b. Hubungan Pihak Konsumen dengan *Supplier*
- c. Hubungan Penyedia Dana (pemberi biaya) dengan *Supplier*

D. Tinjauan Umum tentang Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-*

¹⁷ R. Subekti, 1963, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa, hal. 45

¹⁸ Munir Fuady, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, PT. Citra Aditya, hal.162

up atau margin keuntungan yang disepakati, dalam beberapa kitab fiqih murabahah merupakan salah satu dari bentuk jual-beli yang bersifat amanah, dimana jual-beli ini berbeda dengan jual-beli *musawwamah* (tawar menawar). Murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjual pun diberitahukan kepada pembeli, sedangkan *musawwamah* adalah transaksi yang terlaksana antara penjual dengan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang.¹⁹

2. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

a. Pengaturan dalam Hukum Positif

- 1) Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan ;
- 2) PBI No. 9/19/PBI/2007/jo. PBI No. 10/16/PBI/2008 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah ;
- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 Tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah ;
- 4) Ketentuan pembiayaan murabahah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah ;
- 5) Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang mengatur mengenai kegiatan usaha Bank Umum Syariah yang salah satunya adalah pembiayaan murabahah.²⁰

b. Landasan Syariah

Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di bank syariah. Jual beli dalam Islam sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang di ridhai oleh Allah SWT, dalam jual beli juga sangat diharapkan adanya unsur suka sama suka, sebagaimana disebutkan dalam Al Quran dan Hadits Muhammad SAW sebagai berikut :²¹

QS. An Nisaa' :29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَرْضَ مَرْضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

¹⁹Bahya Agung Prabowo, 2012, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta, UII Press, hal . 26

²⁰ *Ibid*, hal. 29

²¹ *Ibid*, hal. 30

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah

Menurut Jumhur ulama ada empat rukun dalam jual beli, yaitu:

- a. orang yang menjual
- b. orang yang membeli
- c. Sighat
- d. barang atau sesuatu yang di akadkan

keempat rukun tersebut telah disepakati jumhur ulama untuk setiap jenis akad.²²

4. Manfaat dan Resiko Pembiayaan Murabahah

Resiko yang harus diantisipasi diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. *Default* atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran ;
- b. Fluktuasi harga komparatif, ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual-beli tersebut;
- c. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya, karena itu sebaiknya dilindungi dengan asuransi, kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan, bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank, dengan demikian bank mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain;
- d. Dijual, karena murabahah bersifat jual-beli dengan hutang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah, nasabah bebas melakukan apapun terhadap asset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya, jika demikian resiko untuk *default* akan besar.²³

5. Bentuk Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah di perbankan syariah dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yaitu murabahah tanpa pesanan dan murabahah berdasarkan pesanan.

- a. Murabahah Tanpa Pesanan
- b. Murabahah Berdasarkan Pesanan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor di PT. Adira Finance Klaten

Pada dasarnya tidak ada perbedaan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor pada seluruh kantor cabang PT. Adira Finance dengan perusahaan pembiayaan lainnya, yaitu harus melalui tahapan yang telah ditentukan oleh PT. Adira Finance. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor

²² *Ibid*, hal. 31

²³ *Ibid*, hal. 33-34

antara pihak konsumen dengan pihak PT. Adira Finance Klaten, yaitu dengan melalui tahapan-tahapan pokok yang diuraikan sebagai berikut :

1. Tahap Permohonan
2. Tahap Survey
3. Tahap Pembuatan *Customer Profile*
4. Tahap Pengajuan Proposal Kepada Kredit Komite
5. Keputusan Kredit Komite
6. Tahap Pengikatan
7. Tahap Pemesanan Barang
8. Tahap pembayaran kepada *supplier*
9. Tahap Penagihan
10. Tahap Pengambilan Surat Jaminan

B. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor di BMT Surya Ummat Klaten

Untuk mengajukan pembiayaan di BMT Surya Ummat Klaten dapat dilakukan oleh anggota ataupun calon anggota nasabah di BMT Surya Ummat Klaten. Secara keseluruhan pelaksanaan pembiayaan di BMT Surya Ummat Klaten tidak ada perbedaan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan secara konvensional, yaitu harus melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh BMT Surya Ummat Klaten. Tahapan-tahapan pokok tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tahap Permohonan
2. Penentuan Jenis Akad
3. Adanya Jaminan atau Agunan
4. Pengadaan Barang
5. Uang Muka
6. Sanksi / Denda
7. Perhitungan Margin

C. Perbedaan dan Persamaan Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor di PT. Adira Finance Klaten dengan Perjanjian Pembiayaan di BMT Surya Ummat Klaten

1. Perbedaan Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor di PT. Adira Finance Klaten dengan Perjanjian Pembiayaan di BMT Surya Ummat Klaten

Sebenarnya tata cara pembiayaan secara konvensional dengan secara syariah untuk hal-hal yang bersifat konsumtif sangat jauh berbeda secara prinsipnya, meskipun secara matematis, memang kemiripan di antara keduanya. Pada perusahaan pembiayaan konvensional, kredit yang digunakan adalah berdasarkan akad pinjaman, dimana nasabah memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut beserta bunganya di masa yang akan datang. Secara syariah, kelebihan atas pinjaman ini termasuk ke dalam kategori riba, dimana Allah SWT secara tegas telah mengharamkannya (QS 2 :275-281).

Sementara dalam praktik perbankan syariah di tanah air, biasanya yang digunakan adalah akad murabahah (jual beli). Pada murabahah, bank bertindak sebagai penjual barang, sedangkan nasabah adalah pembelinya. Bank dan nasabah kemudian bersepakat untuk menentukan berapa besar margin keuntungan yang dapat dinikmati oleh bank sebagai penjual. Misalkan “x persen”, maka kewajiban nasabah adalah membayar kepada bank, biaya pokok pembelian plus margin keuntungannya. Misal harga kendaraan bermotor Rp. 10.000.000,00 , dan margin keuntungannya 10 persen. Maka kewajiban nasabah adalah Rp 11.000.000,00 . Secara matematis mirip dengan bunga bank, tetapi secara akad berbeda sangat signifikan.

Jadi sudah dapat kita deskripsikan bahwa perbedaan antara pembiayaan konvensional dengan syariah terletak pada akadnya, pada kredit syariah semuanya dilakukan didepan (maksud akad kredit dilakukan di depan adalah keuntungan atau margin ditetapkan diawal) sedangkan pembiayaan konvensional konsumen sudah diberikan tabel pembayaran. Harga *on the road* ditambah dengan bunga dan biaya-biaya lainnya seperti asuransi, kemudian dikurangi uang muka dan dibagi masa pembayaran. Selain itu hal yang membedakan adalah pada sumber hukum yang mengatur pembiayaan, pada pembiayaan secara konvensional bersumber pada hukum positif sedangkan pembiayaan secara syariah bersumber baik pada hukum positif maupun hukum islam.

2. Persamaan Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor di PT. Adira Finance Klaten dengan Perjanjian Pembiayaan di BMT Surya Ummat Klaten

Secara garis besar persamaan pelaksanaan perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor secara konvensional maupun secara syariah terletak pada mekanisme operasional atau prosedur pembiayaan antara kedua perusahaan pembiayaan tersebut, seperti melalui beberapa tahapan. Antara lain melalui tahap permohonan, pengumpulan data, analisa pembiayaan, serta persetujuan pembiayaan. Kedua perusahaan pembiayaan tersebut sama-sama memberikan bantuan pembiayaan konsumen dilandasi dengan kemitraan guna memenuhi kebutuhan barang konsumtif bagi debitur.

3. Hasil Tabel Tentang Perbedaan Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor di PT. Adira Finance Klaten dengan Perjanjian Pembiayaan di BMT Surya Ummat Klaten

Setelah dijelaskan secara rinci tentang perbedaan dan juga persamaan dari pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan secara konvensional dan juga secara syariah, penulis menyertakan kesimpulan dari perbedaan antara pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen secara konvensional dan secara syariah dalam bentuk tabel yang dibuat secara ringkas.

No.	Masalah	Pembiayaan Murabahah (syariah)	Pembiayaan Konsumen (konvensional)
-----	---------	--------------------------------	------------------------------------

1	Akad	<ul style="list-style-type: none"> • Jual- beli • Harus ada barang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pinjam meminjam • Belum ada barangnya
2	Obyek penyerahan	<ul style="list-style-type: none"> • Barang yang diperjualbelikan harus ada • Barang dapat diserahkan sewaktu akad • Barang berupa harta yang jelas harganya • Barang milik sendiri (milik BMT) 	<ul style="list-style-type: none"> • Uang yang akan dipergunakan untuk membeli barang yang dibutuhkan
3	Harga asal barang	<ul style="list-style-type: none"> • Harus diberitahukan kepada nasabah 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada keharusan, karena yang diserahkan uang bukan barang, bahkan tidak tahu harga asal barangnya
4	Tanda bukti nasabah	<ul style="list-style-type: none"> • Tanda terima barang 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanda Terima Uang Tunai Nasabah
5	Hutang nasabah	<ul style="list-style-type: none"> • Sebesar harga jual, yaitu harga perolehan barang ditambah keuntungan yang disepakati 	<ul style="list-style-type: none"> • Pokok kredit ditambah dengan bunga
6	Perhitungan keuntungan	<ul style="list-style-type: none"> • Keuntungan harus disepakati 	<ul style="list-style-type: none"> • Perhitungannya dari sisa/ outstanding pokok kredit yang diberikan kepada nasabah
7	Nasabah melunasi sebelum jatuh tempo	<ul style="list-style-type: none"> • Sebesar sisa hutangnya (hutang awal dikurangi dengan pembayaran angsuran) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sebesar sisa pokok kredit dan biasanya bunga yang belum diterima sebagai potongan pelunasan
8	Denda	<ul style="list-style-type: none"> • Kepada nasabah yang terlambat melakukan pembayaran, 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagi nasabah yang tidak membayar tepat waktu

		namun diberikan kelonggaran atau toleransi bagi nasabah	
--	--	--	--

D. Permasalahan yang Muncul dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor Menggunakan Sistem Konvensional di PT. Adira Finance dengan Perjanjian Pembiayaan Menggunakan Sistem Syariah di BMT Surya Ummat Klaten

1. Permasalahan Yang Muncul Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor Menggunakan Sistem Konvensional di PT. Adira Finance

Permasalahan-permasalahan yang kerap muncul dalam pelaksanaan pembiayaan konsumen di PT. Adira Finance antara lain yaitu :

- Debitur lalai atau tidak membayar angsuran yang telah diperjanjikan padahal telah melewati jatuh tempo
- Obyek perjanjian telah berpindah tangan pada orang lain tanpa sepengetahuan pihak perusahaan pembiayaan
- Obyek perjanjian telah hilang atau musnah

Permasalahan ini sering dihadapi oleh PT. Adira Finance Klaten selaku perusahaan yang memberikan pembiayaan kepada konsumen.

Jika muncul permasalahan-permasalahan seperti yang disebutkan diatas tersebut, maka pihak perusahaan pembiayaan akan melakukan tindakan musyawarah terlebih dahulu dengan pihak debitur. Apabila tidak tercapai kata mufakat atau perdamaian maka dilakukan langkah selanjutnya seperti yang telah disepakati dalam surat perjanjian, berupa penyelesaian melalui arbitrase maupun melalui pengadilan. Namun, penyelesaian melalui arbitrase maupun melalui pengadilan kurang begitu familiar dalam penyelesaian yang dilakukan oleh pihak PT. Adira Finance Klaten, jika muncul masalah seperti yang telah disebutkan diatas maka pihak PT. Adira Finance Klaten akan menyelesaikannya sebagai berikut :

- Pertama-tama perusahaan pembiayaan menghubungi konsumen melalui telepon untuk mengingatkan konsumen mengenai tunggakan angsuran yang telah melewati jatuh tempo selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari. Selain melalui telepon perusahaan pembiayaan juga mengirimkan surat peringatan kepada konsumen agar segera membayar tunggakan angsuran.
- Apabila cara tersebut tidak mendapat tanggapan dari konsumen, perusahaan akan menempuh cara persuasif lainnya yaitu dengan mendatangi konsumen secara langsung untuk mengupayakan bagaimana pembayaran hutang konsumen itu lebih lanjut. Konsumen juga dingatkan kembali terhadap komitmen yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian untuk memenuhi kewajiban kepada perusahaan pembiayaan.

3) Konsumen yang tiga kali berturut-turut tidak membayar tunggakan angsurannya, maka perusahaan akan menarik motor yang menjadi jaminan. Motor tersebut akan ditahan oleh perusahaan pembiayaan guna sebagai pelunasan terhadap hutang dari konsumen. Konsumen yang mempunyai itikad baik dan bersikap kooperatif masih diberikan kesempatan untuk melunasi hutangnya. Konsumen diberi perpanjangan waktu untuk melunasi hutang kepada perusahaan pembiayaan. Selama penahanan motor tersebut, perusahaan pembiayaan masih memberi kesempatan kepada untuk melunasi hutangnya atau paling tidak membayar tunggakan angsuran kreditnya. Perusahaan memberi waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikannya peringatan kepada konsumen untuk menyelesaikan hutangnya dengan perusahaan pembiayaan sebelum perusahaan menjual motor jaminan tersebut dengan cara dilelang kepada pihak lain.²⁴

2. Permasalahan Yang Muncul Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor Menggunakan Menggunakan Sistem Syariah di BMT Surya Ummat Klaten

Untuk mengatasi pembiayaan yang bermasalah tersebut pihak BMT Surya Ummat Klaten melakukan penanganan dengan beberapa cara berikut :

- a. *Rescheduling*, dilakukan dengan cara menjadwal ulang seluruh/sebagian kewajiban anggota (misal : jangka waktu dirubah dengan cara diperpanjang, jumlah angsuran dirubah, margin dirubah dengan cara dikurangi atau pemberian *discount*, dll).
- b. *Restructuring*, dilakukan dengan merubah komposisi pembiayaan.
- c. Eksekusi, tindakan ini adalah tindakan akhir setelah semua cara tidak berhasil, yaitu dengan menyita atau melelang barang jaminan untuk menutup kewajiban anggota.²⁵

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian ilmiah akan dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan metode yang tepat. Metode penelitian merupakan cara kerja yang digunakan untuk mengumpulkan data dari obyek yang menjadi sasaran dari penelitian. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode pendekatan turidis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif.²⁶ Dalam hal ini metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Adira Finance dan pada BMT Surya Ummat Klaten.

²⁴ Wawancara Iwan Saputro, *Marketing Officer PT. Adira Finance*

²⁵ Wawancara Andi Purnama, *Manajer BMT Surya Ummat Klaten*

²⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hal. 52

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu metode penelitian untuk member gambaran mengenai situasi atau kejadian dan menerangkan hubungan antara kejadian tersebut dengan masalah yang akan diteliti.²⁷ Karena dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau realita mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Adira Finance Klaten dan BMT Surya Ummat.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan yang dalam hal ini diperoleh dengan :

Wawancara yaitu cara memperoleh informasi dengan mempertanyakan langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan pelaksanaan dilapangan. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah : pewawancara, yang diwawancarai, topic penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.²⁸

b. Data Sekunder

Diperoleh melalui pengumpulan data berupa bahan-bahan hukum yang diperlukan. Adapun bahan-bahan hukum yang diperlukan adalah sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988 Tentang Pokok-Pokok Perbankan
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syari'ah)
- 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan
- 5) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan
- 6) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan

c. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini yang termasuk bahan hukum sekunder adalah kepustakaan dan literatur-literatur yang berhubungan dengan perjanjian serta lembaga pembiayaan khususnya pembiayaan konsumen, baik pembiayaan konsumen yang menggunakan prinsip konvensional maupun syariah.

3. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif,

²⁷ Mohammad Nazir, 1993, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 64

²⁸ *Ibid*, hal. 57

yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.²⁹

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor di :

a. PT. Adira Finance Klaten

Untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan konsumen berupa kendaraan bermotor pihak debitur harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak PT. Adira Finance Klaten, setelah semua syarat telah dipenuhi oleh pihak debitur maka pihak perusahaan pembiayaan segera memproses semua data dari pihak debitur tersebut. Apabila permohonan pembiayaan konsumen yang diajukan oleh pihak debitur sudah dinilai cukup, maka pihak perusahaan konsumen bersama dengan debitur sepakat melakukan perjanjian pembiayaan yang dituangkan dalam surat perjanjian tertulis dimana secara garis besar surat perjanjian pembiayaan konsumen tersebut menyatakan bahwa pihak debitur menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pemberian fasilitas pembiayaan yang ditetapkan oleh pihak kreditur. Setelah pihak debitur menyerahkan uang muka kepada pihak perusahaan pembiayaan maka pihak perusahaan pembiayaan kemudian menyediakan barang konsumsi (kendaraan bermotor) yang telah dipesan sesuai dengan keinginan pihak debitur, penyerahan barang konsumsi (kendaraan bermotor) diserahkan oleh pihak perusahaan pembiayaan kepada pihak debitur disertai dengan kelengkapan dari barang konsumsi tersebut. Namun, BPKB dari barang konsumsi (kendaraan bermotor) tersebut dijadikan sebagai jaminan (sesuai dengan perjanjian pembiayaan) hingga konsumen melunasi seluruh kewajibannya kepada perusahaan pembiayaan konsumen.

b. BMT Surya Ummat Klaten

Untuk mengajukan pembiayaan di BMT Surya Ummat Klaten dapat dilakukan oleh anggota ataupun calon anggota nasabah di BMT Surya Ummat Klaten. Secara keseluruhan pelaksanaan pembiayaan di BMT Surya Ummat Klaten tidak ada perbedaan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan secara konvensional, yaitu debitur harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak BMT Surya Ummat Klaten. Setelah debitur memenuhi semua syarat-syarat tersebut, pihak debitur bersama pihak kreditur saling menuangkan pemikiran mereka dalam pembuatan perjanjian pembiayaan murabahah. Para pihak dapat memasukkan aspek-aspek syariah dalam konteks hukum positif Indonesia sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang memenuhi syarat sahnya perjanjian baik menurut syariah maupun KUHPerdara Pasal 1320. Dalam penyediaan barang konsumsi (kendaraan

²⁹ Soerjono Soekanto, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hal. 10

bermotor), pembiayaan murabahah berbeda dengan pembiayaan konsumen secara konvensional. Karena dalam pembiayaan murabahah, pengadaan barang diusahakan oleh pihak kreditur, dimana sebelumnya debitur telah menyerahkan uang muka sebesar 40% dari jumlah harga kendaraan bermotor yang dikehendaki oleh debitur. Namun, tidak jauh berbeda dengan pembiayaan konsumen secara konvensional, dalam pembiayaan murabahah juga menerapkan adanya jaminan yaitu BPKB kendaraan motor tersebut sebagai barang jaminan hingga debitur melunasi seluruh kewajibannya terhadap pihak BMT Surya Ummat Klaten.

2. Perjanjian Pembiayaan Konsumen muncul karena kebutuhan dalam masyarakat yang didasarkan pada azas kebebasan berkontrak yang dianut dalam hukum perjanjian. Praktek pembiayaan konsumen pada PT. Adira Finance Klaten maupun praktek pembiayaan murabahah pada BMT Ummat Surya Klaten digunakan untuk pengadaan atau pembelian barang konsumsi (kendaraan bermotor) yang pembayarannya dapat dilakukan secara tangguh (jatuh tempo/ angsuran). Prosedur pelaksanaan pembiayaan antara keduanya hampir mempunyai kesamaan dimana harus melalui beberapa tahapan, antara lain melalui tahapan permohonan, pengumpulan data, analisa pembiayaan, serta persetujuan pembiayaan. Walaupun keduanya memiliki persamaan dalam mekanisme pelaksanaannya, namun keduanya juga mempunyai beberapa perbedaan. Perbedaan tersebut antara lain adalah pada sumber hukum yang mengatur pembiayaan, pada pembiayaan secara konvensional bersumber pada hukum positif sedangkan pembiayaan secara syariah bersumber baik pada hukum positif maupun hukum Islam.
3. Permasalahan yang muncul dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor baik di PT. Adira Finance maupun di BMT Surya Ummat Klaten adalah sebagai berikut :
 - a. Debitur lalai atau tidak membayar angsuran yang telah diperjanjikan padahal telah melewati jatuh tempo
 - b. Obyek perjanjian telah berpindah tangan pada orang lain tanpa sepengetahuan pihak perusahaan pembiayaan
 - c. Obyek perjanjian telah hilang atau musnah.

Saran

1. Sebaiknya pihak perusahaan pembiayaan konsumen menghindari klausula baku yang merugikan pihak konsumen. Pembuatan perjanjian pembiayaan konsumen sebaiknya dilandasi dengan adanya azas kebebasan berkontrak.
2. Konsumen harus menyadari kewajibannya untuk melakukan pembayaran secara tepat waktu sesuai dengan kesepakatan awal serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak kreditur (Perusahaan Pembiayaan).

DAFTAR PUSTAKA

- Anggadiredja, Deddi, 1993, *Lembaga Pembiayaan di Indonesia*, Pengembangan Perbankan.
- Aramayudho, 2012, *Hukum Perikatan*, dalam <http://aramayudho.wordpress.com/2012/04/07/hukum-perjanjian/>, diunduh Kamis 14 Februari 2013 pukul 13:44.
- Djairan, Kamed, 1993, *Lembaga Pembiayaan dan Perannya Dalam Menunjang Kegiatan Dunia Usaha*, Pengembangan Perbankan.
- Fuady, Munir, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung :Citra Aditya Bakti.
- Handeson, Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan PT WOM Finance, dalam http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%20lembaga%20pembiayaan%20secara%20konvensional&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fjournal.unesa.ac.id%2Findex.php%2Fjurnal-akuntansi%2Farticle%2Fview%2F305%2F229&ei=GPPWUIi0A4HKrAfg_oCoCQ&usg=AFQjCNEcB1Fm1Xtvej_SYfT-u4PY-66gLQ&bvm=bv.1355534169,d.bmk, diunduh Kamis 31 Januari 2013 pukul 13:43.
- Hariyanto, M, 2009, *Azas Azas Perjanjian*, dalam <http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/asas-asas-perjanjian.html>, diunduh Kamis 14 Februari 2013 pukul 11:45.
- <http://id.shvoong.com/business-management/investing/2077021-pengertian-lembaga-pembiayaan/#ixzz2Kr6eWbGf>, diunduh Kamis 14 Februari 2013 pukul 14:24.
- <http://www.adira.co.id/LayananProduk/PersyaratandanDokumenKredit/tabid/69/language/id-ID/Default.aspx>, diunduh Jumat tanggal 1 Maret 2013 pukul 17:26.
- http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/komite_kredit.aspx, diunduh Jumat tanggal 1 Maret 2013 pukul 17:51.
- Meliala, A. Qiram Syamsudin, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta:Liberty.
- Muhammad, Abdul Kadir, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung :Citra Aditya Bakti.

Muhammad, 2005, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta :UPP AMP YKPN.

Nazur, Mohammad, 1993, *Metode Penelitian*, Jakarta :UI Press.
Pasal 2 Keppres No :61 Tahun 1988 *tentang Lembaga Pembiayaan*.

Patrik ,Purwahid, 1986, *Azas Itikad Dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Badan Penerbit UNDIP.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Prabandari, Retno, 2007, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja*, dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29515/3/Chapter%20II.pdf>, diunduh Kamis 14 Februari 2013 pukul 13:38.

R, Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung :PT. Bina Cipta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :UI Press.

Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta :Sinar Grafika.

Subekti, R, 1992, *Aneka Perjanjian*, Bandung :PT. Citra Aditya Bakti.

_____. 1963, *Hukum Perjanjian*, Jakarta :PT. Intermasa.

Tunardy, Wibowo, 2012, *Jurnal Hukum*, dalam <http://www.jurnalhukum.com/asas-asas-perjanjian/>, diunduh Kamis, 14 Februari 2013 pukul 11:16.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Wiroso, 2005, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta :UII Press.

Yahya, Rachdian, *Azas Azas Hukum Perjanjian*, dalam <http://www.dheanbj.com/2012/09/asas-asas-hukum-perjanjian.html>, diunduh Kamis, 14 Februari 2013 pukul 11:06.